



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR

#### 2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana pada waktu yang akan datang. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan.

Menurut Kieso (2013) pengguna laporan keuangan meliputi:

##### 1. Internal

- a. Bagian *Finance*, yaitu untuk mengetahui nilai kas dalam membayar dividen kepada pemegang saham.
- b. Bagian *Marketing*, yaitu untuk mengetahui nilai dari produk yang dijual perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan bersih perusahaan.
- c. *Management* Perusahaan, yaitu memberikan laporan internal untuk membantu pengguna membuat keputusan tentang perusahaan mereka.
- d. *Human Resources*, yaitu memprediksi kemampuan perusahaan dalam mensejahterakan dan membayar gaji karyawan.

## 2. Eksternal

- a. *Regulatory agencies*, yaitu melihat kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan yang ditentukan.
- b. *Customers*, yaitu membantu konsumen dan masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*), menjamin eksistensi produk yang dikonsumsi dan mendukung lini produk.
- c. *Taxing Authorities*, membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
- d. *Labor unions*, yaitu menilai perusahaan untuk dapat membayar upah dan manfaat bagi anggota serikat
- e. *Creditors*, yaitu tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- f. *Investors*, yaitu dalam penanaman modal yang membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

Dilihat dari banyaknya pengguna laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Menurut (IAI, 2014) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut :

- a. Laporan Posisi Keuangan (neraca) pada akhir periode,
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif selama periode.
- c. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode,
- d. Laporan Arus Kas selama periode,

- e. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan
- f. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan.

Dilihat dari banyaknya pengguna laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat penting karena laporan keuangan merupakan salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan sehingga penyajiannya harus sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014), penyajian laporan keuangan secara wajar mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Dengan terpenuhinya keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan manajerial maupun investasi. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014), karakteristik kualitatif laporan keuangan dijabarkan sebagai berikut.

#### 1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi

dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

## 2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

## 4) Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan

secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

## 2.2 Auditing

Audit memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena Akuntan Publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Agoes, 2012). Menurut Arens *et al.* (2014) audit adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Menurut Arens, dkk (2014), ada tiga jenis audit yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu:

### 1. Audit Operasional (*operational audit*)

Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional ini, penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya.

### 2. Audit Ketaatan (*compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari *audit* ketaatan dilaporkan kepada manajemen, bukan

kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

### 3. Audit Laporan Keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Auditor merencanakan kombinasi yang tepat antara tujuan audit dan bukti audit, untuk memenuhi tujuan tersebut dengan mengikuti suatu proses audit. Suatu proses audit adalah suatu metodologi yang tersusun baik untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang terkumpul telah memadai dan kompeten serta semua tujuan audit yang tepat telah terspesifikasi dan dipenuhi. Proses audit tersebut memiliki empat fase, yaitu (Arens, dkk, 2014):

#### 1. Merencanakan dan Mendesain Pendekatan Audit (fase 1)

Standar pemeriksaan yang berlaku umum pertama untuk pekerjaan lapangan berbunyi sebagai berikut: "Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya". Ada tiga alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat: untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat yang mencakupi pada situasi yang dihadapi, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien.

2. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi terjadi (fase 2).

Sebelum dapat memutuskan untuk mengurangi penilaian auditor atas risiko pengendalian yang direncanakan apabila pengendalian internal dianggap efektif, auditor harus menguji keefektifan pengendalian tersebut. Prosedur pengujian tersebut disebut sebagai pengujian pengendalian (*test of control*). Auditor juga harus mengevaluasi pencatatan transaksi oleh klien dengan memverifikasi jumlah moneter transaksi tersebut. Proses tersebut disebut sebagai pengujian substantif atas transaksi (*substantive test of transactions*).

3. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo (fase 3).

Prosedur analitis dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya telah masuk akal. Pengujian atas rincian saldo (*test of detail of balances*) merupakan prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Pengujian atas rincian saldo akhir merupakan hal yang esensial dalam pelaksanaan audit karena sebagian besar bukti diperoleh dari sumber yang independen terhadap klien sehingga dianggap berkualitas tinggi.

4. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit (fase 4).

Dalam tahap penyelesaian audit, prosedur analitis tetap dibutuhkan sebagai revidi akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan, dan membantu auditor mengambil “pandangan objektif” pada akhir laporan keuangan yang telah diaudit. Setelah menyelesaikan semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun laporan keuangan serta pengungkapan terkait, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh

tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses ini sangat mengandalkan pertimbangan profesional auditor. Bila audit telah selesai dilakukan, auditor harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasi oleh klien. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan audit ini merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena auditor harus mengkomunikasikan hasil pekerjaan auditnya kepada pengguna laporan keuangan.

Pada fase pertama Aktivitas perencanaan dan perancangan pendekatan audit meliputi proses (Kieso, 2013):

a. Perencanaan audit awal melibatkan empat hal, yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit. Empat hal tersebut adalah:

- 1) Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru atau melanjutkan pelayanan untuk klien yang telah ada sekarang.
- 2) Auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi bagian lain dari proses perencanaan.
- 3) Auditor memperoleh pemahaman klien tentang cara-cara penugasan untuk menghindari kesalahpahaman.
- 4) Akhirnya, staf untuk penugasan itu dipilih, termasuk bila dibutuhkannya spesialis audit.

b. Memahami Bisnis dan Industri Klien

Sebuah pemahaman menyeluruh atas bisnis dan industri klien dan pengetahuan tentang operasional perusahaan adalah penting untuk melakukan suatu audit yang memadai. Sifat dari bisnis dan industri klien mempengaruhi

risiko bisnis klien tersebut dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

c. Menilai Risiko Bisnis Klien

Auditor menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman sistem strategis akan bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko di mana klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien bisa timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya. Contoh dari faktor-faktor tersebut adalah sebuah teknologi baru bisa mengikis keuntungan kompetitif seorang klien, atau klien bisa gagal dalam melaksanakan strateginya seperti juga pesaing. Perhatian utama auditor adalah risiko dari salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien.

d. Melaksanakan Prosedur Analitis Pendahuluan

Bagian penting dari pemahaman akan bisnis klien dan penilaian risiko bisnis klien adalah melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Perbandingan antara risiko klien dengan *benchmark* industri atau pesaing memberikan indikasi kinerja perusahaan. Perubahan yang tidak biasa atas rasio bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri sehingga akan membantu mengidentifikasi area yang mengalami kenaikan risiko salah saji yang membutuhkan perhatian lebih lanjut selama audit.

e. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima

serta risiko inheren. Idealnya, auditor, pada awal masa penugasan audit, terlebih dahulu menetapkan nilai kesalahan penyajian gabungan dalam laporan keuangan yang menurutnya adalah material.

Pertimbangan tersebut disebut sebagai pertimbangan awal tentang tingkat materialitas karena pertimbangan ini merupakan suatu pertimbangan profesional dan dapat berubah selama proses penugasan jika ternyata situasi-situasi yang melingkupinya berubah. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas tersebut selanjutnya merupakan nilai maksimum yang diyakini auditor merupakan kandungan kesalahan penyajian yang mungkin masih terdapat dalam laporan keuangan dan tetap tidak mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan.

Auditor menerima sejumlah tingkat risiko atau ketidakpastian dalam menjalankan fungsi auditnya. Auditor juga harus menetapkan dan memutuskan risiko audit yang dapat diterima (*acceptable audit risk*) yang tepat selama perencanaan audit. Risiko akseptabilitas merupakan tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan.

Auditor juga harus menilai risiko inheren yang akan mempengaruhi jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan auditor. Risiko inheren merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material (kekeliruan atau kecurangan) dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dari pengendalian intern yang ada. Jika auditor, dengan mengabaikan pengendalian intern, menyimpulkan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang tinggi atas keberadaan sejumlah salah saji, maka auditor akan menyimpulkan bahwa tingkat risiko inherennya tinggi.

f. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian Auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal dan harus mengevaluasi keefektifannya. Jika pengendalian internal tersebut dianggap efektif, maka risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan menjadi lebih sedikit, daripada pengendalian internal yang tidak memadai atau tidak efektif. Risiko pengendalian (*control risk*) merupakan pengukuran terhadap suatu penilaian *auditor* mengenai apakah salah saji yang melebihi jumlah yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen, akan dicegah atau terdeteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal.

g. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan

Untuk meniali persyaratan standar audit, lebih penting bagi auditor untuk menilai risiko dan memberikan respon kepadanya daripada hanya mengidentifikasikan mereka sebagai resiko akseptibilitas atau risiko yang dapat diterima, risiko inheren, dan risiko pengendalian. Karena alasan ini, banyak kantor audit menilai risiko kecurangan secara terpisah dari penilaian komponen model risiko.

h. Mengembangkan rencana serta program audit secara keseluruhan.

Pengembangan rencana serta program audit secara keseluruhan adalah langka terakhir dalam tahap perencanaan audit. Langkah ini menetapkan seluruh program audit yang rencananya akan diikuti oleh auditor, meliputi semua prosedur audit, ukuran sampel, pos yang dipilih, dan penetapan waktu. Auditor juga harus mempertimbangkan baik efektivitas bukti, maupun efisiensi audit dalam menyusun rencana audit dan mengembangkan program audit yang terinci.

Menurut Arens (2014) laporan hasil pemeriksaan terbaru yang berlaku di Indonesia sejak 2014 terbagi menjadi delapan bagian:

1. Judul laporan pemeriksaan (*report title*). Standar pemeriksaan mengharuskan bahwa laporan hasil pemeriksaan untuk memiliki judul dan judul laporan tersebut harus bertuliskan independen, yang berarti bahwa laporan keuangan auditan disajikan secara wajar tidak memihak pada pihak berkepentingan tertentu.
2. Alamat Kantor Akuntan Publik (*audit report address*). Alamat kantor akuntan publik diperlukan untuk menyatakan bahwa auditor tersebut merupakan pihak yang terpisah dari perusahaan (independen).
3. Paragraf pengantar (*introductory paragraph*). Paragraf pertama dari laporan pemeriksaan menyatakan bahwa KAP telah melakukan audit dan bahwa laporan keuangan telah diperiksa termasuk tanggal pada catatan atas laporan keuangan, tanggal neraca, periode akuntansi atas laporan laba rugi serta laporan arus kas.
4. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan (*management responsibility*). Pada paragraf ini dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen, tanggung jawab yang dimaksudkan termasuk dalam menetapkan standar dalam pembuatan laporan keuangan, memelihara *internal control* perusahaan terhadap pembuatan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dikarenakan *fraud atau error*.
5. Tanggung jawab auditor (*auditor responsibility*). Tanggung jawab auditor

terbagi menjadi tiga paragraf, paragraf pertama menyatakan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan Standar profesional akuntan publik. Audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji yang material. Material bersifat relatif tidak mutlak 100%. Paragraf kedua menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan berdasarkan penilaian auditor termasuk dalam penilaian resiko dan tingkat materialitas pada laporan keuangan dan paragraf ketiga menjelaskan bahwa pengumpulan bukti, auditor yakin bahwa bukti yang dikumpulkan telah memberikan dasar yang memadai bagi pernyataan pendapat.

6. Paragraf opini (*opinion paragraph*). Pada bagian ini auditor memberikan pernyataan atas kesimpulan dari keseluruhan audit yang dilaksanakan, pendapat dibuat berdasarkan pertimbangan professional, Kesimpulan bahwa laporan keuangan telah mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku.
7. Nama dan alamat KAP (*name and address of CPA firm*). Mengidentifikasi kantor akuntan, partner yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut.
8. Tanggal pelaporan (*audit report date*). Tanggal penyelesaian terakhir pekerjaan lapangan dan tanggal terakhir menyelesaikan prosedur audit terpenting di lapangan (Lampiran 1).

## 2.2 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terdapat kesalahan pada laporan keuangan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor akan dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Rosnidah, (2010) dalam Agusti dan Pertiwi, (2013)). Sedangkan menurut Christiawan (2005) dalam Badjuri (2011) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi.

Menurut SA Seksi 150 (IAPI, 2011) (Standar Auditing) ada beberapa ketentuan mengenai standar audit :

### 1) Standar Umum

- a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

### 2) Standar Pekerjaan Lapangan

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### 3) Standar Pelaporan

a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Berbagai asersi manajemen diterapkan atau diekspresikan sebagai pernyataan manajemen tentang berbagai kelas transaksi dan berbagai akun yang terkait dengannya dalam laporan keuangan (Arens, dkk, 2014). Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan

besar sebagai berikut (Arens, dkk, 2014) :

1. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aset atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.

2. Kelengkapan (*completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya.

3. Hak dan kewajiban (*right and obligation*)

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aset merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Penilaian (*valuation*) atau alokasi

Asersi tentang penilaian dan alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset, liabilitas, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

5. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Menurut SA Seksi 320, (IAPI, 2013), pada saat menetapkan strategi audit seorang auditor harus menentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, materialitas ditentukan apa bila terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian dan diperkirakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan maka pernyataan tersebut dinyatakan material. Auditor harus menetapkan materialitas

pelaksanaan untuk menilai resiko kesalahan dan memutuskan sifat pada saat prosedur audit lanjutan (IAPI 2013). Terdapat tiga jenis materialitas, yaitu:

1. Nilainya tidak Material, ketika suatu kesalahan penyajian terjadi dalam laporan keuangan tetapi salah saji tersebut tidak mungkin mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tidak material.
2. Nilainya material tetapi tidak Mempengaruhi Keseluruhan Penyajian Laporan Keuangan, tingkat materialitas ini hadir pada saat terdapat suatu kesalahan penyajian dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan seorang pengguna laporan, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan tetap disajikan secara wajar dan tetap dapat digunakan.
3. Nilainya Sangat Material sehingga Kewajaran Seluruh Laporan Keuangan Dipertanyakan, merupakan tingkat materialitas tertinggi yang hadir saat terdapat probabilitas yang sangat tinggi bahwa pengguna laporan akan membuat keputusan yang tidak benar jika pengguna laporan menyandarkan dirinya pada keseluruhan laporan keuangan dalam pembuatan keputusan mereka (Arens, dkk, 2014).

Terdapat tiga jenis risiko audit (Arens, dkk, 2014) :

1. Risiko Bawaan  
Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.
2. Risiko Pengendalian  
Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh

pengendalian intern entitas.

### 3. Risiko Deteksi

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi.

Setelah menentukan risiko maka auditor akan menentukan bukti-bukti audit yang akan dijadikan sample pada saat pemeriksaan. Menurut Arens (2014), ada beberapa jenis bahan bukti yang dapat dipilih oleh auditor dalam rangka mengevaluasi bukti audit, yaitu:

a. Pemeriksaan Fisik adalah suatu pemeriksaan langsung atas aset yang berwujud, seperti: persediaan barang, uang kas, kertas berharga; seperti saham, wesel tagih, aset tetap berwujud; seperti bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan kantor. Pemeriksaan fisik adalah untuk memeriksa kuantitas, deskripsi, kondisi dan kualitas dari aset yang diperiksa.

b. Konfirmasi adalah jawaban atas permintaan auditor baik tertulis maupun lisan mengenai keakuratan suatu informasi dari pihak ketiga yang independen (sebaiknya tertulis). Jawaban tersebut seyogyanya langsung disampaikan kepada auditor. Proses konfirmasi adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi dikirimkan ke pihak ketiga yang independen.
- 2) Pihak ketiga memeriksa akurasi informasi tersebut
- 3) Pihak ketiga langsung mengirimkan hasil pemeriksaannya kepada auditor.

Konfirmasi terdiri atas 2 tipe: 1) Konfirmasi positif. Pada konfirmasi ini, pihak ketiga diminta untuk menjawab baik informasi yang diterimanya akurat maupun tidak akurat. 2) Konfirmasi negatif. Pada konfirmasi ini, pihak ketiga diminta untuk menjawab jika informasi yang diterimanya tidak akurat.

c. Prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan untuk mengetahui apakah suatu angka atau data merupakan angka atau data yang logis. Prosedur analitis pada garis besarnya dapat dilakukan dengan lima cara:

- 1) Memahami industri bisnis klien.
- 2) Membandingkan data keuangan yang ada di laporan keuangan perusahaan yang diaudit dengan data perusahaan yang sejenis untuk tahun/periode yang sama.
- 3) Membandingkan data keuangan yang ada di laporan keuangan dengan anggarannya.
- 4) Membandingkan data yang di laporan keuangan dengan data atau informasi yang diketahui auditor atau hasil perhitungan auditor.
- 5) Membandingkan data keuangan yang ada di laporan keuangan dengan data non-keuangan yang ada kaitannya (*relationship*)

Prosedur analitis terbagi menjadi beberapa tipe:

- 1) Memahami industri bisnis klien, auditor harus memahami industri bisnis dari klien sebagai bagian dari perencanaan audit.
- 2) Menilai *going concern* dari sebuah entitas, dalam prosedur analisis sering digunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah klien memiliki masalah keuangan sehingga dapat dinilai apakah kelangsungan usaha perusahaan dapat bertahan atau tidak.
- 3) Mengindikasikan kemungkinan adanya salah saji pada laporan keuangan.
- 4) Mengurangi prosedur tes yang dijalankan.

d. Inspeksi, bukti dokumenter dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu :

- 1) Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang independen yang dikirimkan langsung kepada auditor, misalnya konfirmasi yang merupakan penerimaan jawaban tertulis dari pihak yang independen di luar klien yang berisi verifikasi ketelitian yang diminta oleh auditor.

- 2) Bukti dokumenter yang dibuat oleh pihak luar yang independen yang disimpan dalam arsip klien, misalnya rekening koran bank, faktur dari penjual, order pembelian dari pelanggan, dan lain - lain. Untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap jenis bukti dokumenter ini, auditor harus mempertimbangkan apakah dokumen tersebut dapat dengan mudah diubah atau dibuat oleh karyawan dalam organisasi klien.
- e. Tanya Jawab (wawancara, *interview*, *Inquiries*). Tanya jawab dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tanya jawab dilakukan kepada personil atau pihak perusahaan. Apa saja yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada pihak perusahaan, misalnya mengenai metode pencatatan, proses produksi, proses pembayaran gaji/upah dan sebagainya. Tetapi dalam tanya jawab ini harus hati-hati, karena pihak perusahaan bukanlah pihak yang independen, sehingga kemungkinan memperoleh jawaban yang bias tetap ada. Dalam tanya jawab sebaiknya dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang dimengerti oleh pihak yang ditanya, sehingga informasi yang diperoleh lebih baik. Sebagian hasil tanya jawab ini mungkin saja dapat diperkuat atau dicek kesesuaiannya dengan bukti lain seperti observasi atau dokumen dapat dicek kesesuaiannya dengan tanya jawab.
- f. Observasi adalah penggunaan penglihatan dan indera lain untuk menilai atau memeriksa kegiatan-kegiatan tertentu misalnya jika di catatan kepegawaian ada 15 personil di bagian akuntansi, auditor dapat berkunjung ke bagian akuntansi untuk melihat apakah ada 15 orang yang bekerja di bagian akuntansi. Jika kurang dari 15 orang, perlu ditanyakan apakah ada personil yang cuti atau sedang keluar kantor. Demikian juga, jika di catatan tidak ada barang setengah jadi (*work in process*), auditor dapat berkunjung ke pabrik untuk melihat bagaimana proses produksi di perusahaan, untuk memastikan tidak adanya barang setengah jadi. Misalnya menurut

catatan dan informasi di perusahaan mesin yang baru dibeli perusahaan, kapasitasnya dapat menghasilkan 1.000 unit produk per jam. Untuk memeriksa hal di atas, auditor dapat meminta untuk melakukan observasi beroperasinya mesin tersebut.

- g. Penghitungan kembali (*recalculation*). Penghitungan kembali adalah mengulangi apa yang telah dilakukan atas suatu data atau informasi. Misalnya suatu faktur penjualan, jumlah rupiah di faktur tersebut Rp. 5 juta. Auditor akan menghitung kembali dengan mengalikan kuantitas barang yang dijual dengan harga per unit dari barang tersebut, kemudian mengurangnya jika ada diskon dan sebagainya, sehingga diperoleh angka Rp. 5 juta.
- h. pelaksanaan ulang (*reperformance*). Pelaksanaan ulang adalah dengan cara auditor melakukan pengujian terhadap prosedur akuntansi klien atau control yang telah dilakukan sebagai bagian dari *internal control* perusahaan. Pengecekan termasuk dalam perhitungan dan prosedurnya, misalnya auditor dapat membandingkan harga yang tertera pada invoice dengan daftar harga yang diterima atau dapat membuat kembali *aging schedule* atas piutang.

Pada akhir laporan pemeriksaan auditor akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan pemeriksaanya. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik PSA 29 SA Seksi 508 (IAPI 2011), ada lima jenis pendapat auditor yang terdapat dalam Laporan Auditor, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.

- a) Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
- b) Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
- c) Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

## 2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan yang Ditambahkan (*Modified Unqualified Opinion*)

dalam laporan audit bentuk baku keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:

- a) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.
- b) Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
- c) Laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d) Terdapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

e) Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.

f) Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh OJK namun tidak disajikan

### 3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan

Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:

a) Bukti kurang cukup

b) Adanya pembatasan ruang lingkup

c) Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).

Menurut SA 508 paragraf 20 (IAPI, 2011), jenis pendapat ini diberikan apabila:

i. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

ii. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

### 4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

## 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai.

Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan publik harus berpegang pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Penerapan standar audit dalam melaksanakan audit dapat dilihat pada saat menerima penugasan, auditor menetapkan sasaran, ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan. Dalam proses pengumpulan dan pengujian bukti harus dilaksanakan dengan maksimal untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Selain itu juga dalam melaksanakan audit, auditor juga harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Disamping penggunaan standar audit dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, kualitas audit juga dapat diukur dari kualitas laporan pemeriksaan yang dihasilkan auditor. Keandalan laporan auditan yang dihasilkan auditor berarti tidak mengandung salah saji material. Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, meyakinkan, jelas, ringkas, dan tepat waktu agar informasi yang diberikan dan disediakan dapat bermanfaat secara maksimal. Laporan hasil audit yang berkualitas juga memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif serta rekomendasi yang konstruktif sehingga dapat dikatakan berkualitas. Sejalan dengan Agoes (2012) Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kompetensi, independensi, akuntabilitas dan pengalaman kerja, menurut Sari (2012) Kompetensi dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit didukung dengan penelitian Samsi (2013), Agusti dan Pertiwi (2013).

## 2.4 Kompetensi

Menurut Kamus Besar LOMA (1998) dalam Ardini (2010) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dalam diri seseorang pekerja yang memungkinkannya untuk mencapai kinerja superior. Aspek- aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Saifuddin (2004) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Adapun Lastanti (2005) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sedangkan kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Agusti dan Pertiwi 2013).

Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengatakan bahwa akuntan publik wajib menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup dan secara eksplisit dapat digunakan untuk

melakukan audit secara objektif, ukuran keahlian atau kompetensi tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan- pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman yaitu pengetahuan (Ilmiyati dan Suhardjo, 2012).

Kompetensi dapat diukur dengan mutu personal, keahlian umum dan keahlian khusus. Berkenaan dengan keahlian yang harus dimiliki auditor, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor harus dapat memperoleh kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan dan pelatihan ini dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan S1 akuntansi, melanjutkan pendidikan S2 akuntansi juga sertifikasi CPA (*Certified Public Accountant*) dan PPL (Pendidikan Profesional Berkelanjutan) yang diadakan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia), serta pengalaman kerja. Kompetensi yang diperoleh ini harus selalu dipertahankan dan dikembangkan dengan terus-menerus mengikuti perkembangan dalam profesi akuntansi, termasuk melalui penerbitan penerbitan nasional dan internasional yang relevan dengan akuntansi, auditing, dan keterampilan-keterampilan teknis lainnya.

Menurut Ilmiyati dan Suhardjo (2012), terdapat dua komponen kompetensi yaitu:

- a. Pengetahuan, dalam mendeteksi sebuah kesalahan, auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan.
- b. Pengalaman kerja, pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal. Pengalaman kerja menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang

untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan. Dalam menghasilkan audit yang berkualitas, akuntan publik harus menyadari adanya tanggung jawab kepada publik, kepada klien, dan kepada semua praktisi, termasuk perilaku terhormat, bahkan jika hal tersebut berarti melakukan pengorbanan atas kepentingan pribadi (Arens,dkk,2014). Sehingga semakin tingginya kompetensi yang dimiliki auditor maka auditor akan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam hal penetapan tingkat materialitas, resiko dan menentukan bukti audit yang diperlukan sehingga kualitas auditnya akan semakin baik. Dalam penelitian Sari (2012), menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ardini (2010), Saputra (2012), Kisanawati (2012), Agusti dan Pertiwi (2013).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

## **2.5 Independensi**

Independensi menurut Arens dkk. (2014) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias, auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 200 (IAPI, 2013), Independensi auditor menentukan kemampuan auditor untuk merumuskan suatu

opini audit tanpa dipengaruhi, independensi meningkatkan kemampuan auditor dalam menjaga integritasnya serta bertindak secara objektif dan memelihara suatu sikap skeptisisme profesional. Dalam memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan. Hal ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak memihak pada siapapun, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Tuanakotta (2011) menekankan tiga dimensi dari independensi sebagai berikut:

1. *Programming Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit itu diterapkan.
2. *Investigate Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. *Reporting Independence* adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.

Independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010):

1. Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah

diperiksa akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.

2. Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Sikap independen harus dimiliki seorang auditor sejak penyusunan program agar prosedur yang ditetapkan tepat dan dalam pelaksanaannya menggunakan bukti yang kompeten yang cukup dan menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka kualitas auditnya akan semakin baik karena mampu mengungkapkan temuan-temuan yang bersifat objektif yang tidak memihak pada kepentingan tertentu. Dalam penelitian Sari (2012), menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut didukung oleh penelitian Singgih dan Bawono (2010), Sariudin, dkk (2012), Tjun Tjun (2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>: Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

## **2.6 Akuntabilitas**

Menurut Tetclock (1987) dalam Badjuri (2011) Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi bagi seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa akuntabilitas dan kualitas audit memiliki hubungan seajar, Tan dan Alison (1999) dalam

Badjuri (2011) juga menambahkan bahwa seseorang yang akuntabilitasnya tinggi yakin bahwa pekerjaan mereka akan dinilai oleh pihak lain yang kompeten dibanding yang akuntabilitasnya rendah.

Tan dan Alison (1999) dalam Salsabila dan Prayudiawan (2011) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu,

- 1) Besar motivasi Auditor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft (1993) dalam Salsabila dan Prayudiawan (2011), dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.
- 2) Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar ketika menyelesaikan pekerjaan.
- 3) Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Menurut Tan dan Alison (1999) dalam Salsabila dan Prayudiawan (2011), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

Auditor harus selalu menjunjung tinggi akuntabilitas kepada publik karena pada dasarnya mereka bekerja sebagai perwakilan masyarakat/publik. Jika seorang

akuntan menyadari akan betapa besar perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya maka ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan profesinya tersebut (Singgih dan Icuk, 2010 dalam Badjuri 2011). Akuntabilitas seorang auditor merupakan perwujudan kewajiban yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada auditor tersebut demi pencapaian kualitas yang baik atas hasil laporan pemeriksaan yang dibuat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dimiliki auditor maka auditor akan senantiasa melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat dan motivasi tinggi serta bertanggung jawab sehingga menghasilkan kualitas audit yang semakin baik karena hasil audit yang sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mencerminkan kewajaran dari laporan keuangan. Singgih dan Icuk (2010) dalam Badjuri (2011) juga berpendapat bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dan didukung Ilmiyati dan Yohannes (2012) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja auditor. Dengan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh auditor selama proses audit maka diharapkan dapat mendukung kualitas audit yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub> : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.

## **2.7 Pengalaman Kerja**

Menurut Loehoer (2002) dalam Maburri dan Winarna (2010), pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Untuk membuat *audit judgement*, pengalaman merupakan komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan mempengaruhi suatu *judgement* yang

kompleks. Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002 dalam Ayuningtyas dan Sugeng 2012). Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit (nataline, 2007 dalam Maburi dan Winarna 2010). Libby dan Trotman (2002) dalam Maburi dan Winarna (2010) juga mengatakan bahwa seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggung jawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Bonner (1990) Dalam Hutabarat (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman.

Menurut Bonner (1990) dalam Hutabarat (2012) pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor. Menurut Singgih, Bawono (2010) Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya, atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis. Secara psikis, pengalaman akan membentuk pribadi seseorang, yaitu akan membuat seseorang lebih bijaksana baik dalam berpikir maupun bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik dan saat dia dalam keadaan buruk (Singgih, Bawono (2010)). Seseorang akan semakin berhati-hati dalam bertindak ketika ia merasakan fatalnya melakukan kesalahan. Dia akan merasa

senang ketika berhasil menemukan pemecahan masalah dan akan melakukan hal serupa ketika terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan merasa bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya (Singgih, Bawono (2010)). Didukung dengan penelitian Butt (1988) dalam Hutabarat (2012) mengungkapkan bahwa akuntan pemeriksa yang berpengalaman akan membuat *judgment* yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesional ketimbang akuntan pemeriksa yang belum berpengalaman.

Choo dan Trotman (1991) dalam Hutabarat (2012) memberikan bukti empiris bahwa auditor berpengalaman lebih banyak menemukan *item-item* yang tidak umum (*atypical*) dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan item-item yang umum (*typical*). Penelitian serupa dilakukan oleh Tubbs (1992) dalam Hutabarat (2012) menunjukkan bahwa subyek yang mempunyai pengalaman audit lebih banyak, maka akan menemukan kesalahan yang lebih banyak dan item-item kesalahannya lebih besar dibandingkan auditor yang pengalaman auditnya lebih sedikit. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka tentu tugas pemeriksaan yang pernah ia lakukan akan semakin banyak sehingga auditor dapat lebih mudah mendeteksi kesalahan yang dilakukan objek pemeriksaan dan juga lebih mudah mengetahui penyebab munculnya masalah tersebut dan bagaimana mengatasinya karena semakin banyak tugas yang dihadapi memberikan kesempatan auditor tersebut untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang sebelumnya dan memacu auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan tugas sehingga laporan pemeriksaan dapat selesai tepat waktu dan kualitas auditnya pun meningkat.

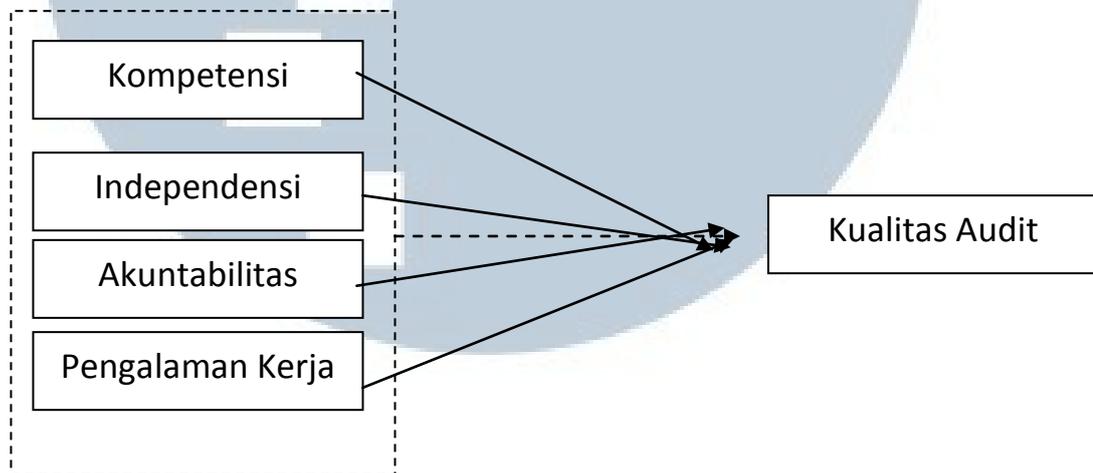
Hutabarat (2012) mengatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas terhadap kualitas audit didukung dengan penelitian menurut Sukriah (2010),

Rahayu (2012). Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>: Pengalaman Kerja secara berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## 2.8 Model Penelitian

Gambar 2.1



UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA